PAPER

View Article Online
Journal J.SSE

J.SSE Journals of Social, Science, and Engineering
SOCIAL, SCIENCE, AND ENGINEERING
E-mail: jsse@unifa.ac.id, website: http://journal.unifa.ac.id/index.php/jsse

PAPER
View Article Online
View Journal View Issue

Cite this:
J.SSE Vol 2(1), 65, 2023

Received Date:
16 April 2023
Accepted Date:
6 Mei 2023

Keywords:
Political Communication, Cadreization, Women, Golkar Party

Kata Kunci:
Komunikasi Politik, Kaderisasi, Perempuan, Partai Golkar

Strategi Komunikasi Politik Kaderisasi Perempuan Partai Golkar Soppeng

Political Communication Strategy For Female Cadre Of Golkar Soppeng Party

*Elsa Febrianti[1]; Muhammad Asdar;[2]

[1] Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar, 90231, Indonesia

[2] Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar, 90231, Indonesia

**Email: Febriantielsa53@gmail.com; firdaus.mumammad@uinalauddin.ac.id; abidinasdar@yahoo.co.id@gmail.com*
(Email institusi: pascasarjana@unifa.ac.id)

Abstract. *This study aims to find out how the political communication strategy for women from the Golkar Soppeng party in regeneration, as well as various supporting and inhibiting factors in the process of cadre of women in the Golkar Soppeng party. The design of this research is descriptive qualitative with Interactive analysis method from Miles and Huberman. The results of the study prove that the political communication strategy carried out by the Golkar party in Soppeng Regency in the implementation of regeneration for female politicians in the Golkar party is carried out through political campaign activities, socialization of political programs and policies and through communication media channels. Meanwhile, the supporting factors in the cadre of women politicians from the Golkar Party in Soppeng Regency are regulatory support, in the form of a 30% affirmative quota policy, as well as support from the Golkar political elite, especially in budget allocation for regeneration activities. Barriers to the implementation of regeneration include the consistency and commitment of the party in terms of the implementation of training based on regeneration is still low, in addition to the existence of internal conflicts, and public apathy towards the performance and image of the Golkar party due to the disintegrity and behavior of cadres who violate the law.*

Keywords*: Political Communication, Cadreization, Women, Golkar Party*

Abstrak. Hasil penelitian membuktikan bahwa Strategi komunikasi politik yang dilakukan partai golkar Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan kaderisasi bagi politisi perempuan di partai Golkar, dijalankan melalui kegiatan kampanye politik, sosialisasi program dan kebijakan politis serta melalui saluran media komunikasi. Sedangkan factor pendukung dalam kaderisasi perempuan politisi partai Golkar Kabupaten Soppeng adalah adanya dukungan regulasi, berupa kebijakan affirmative kuota 30%, serta dukungan elit politik golkar, khususnya dalam alokasi anggaran untuk kegiatan kaderisasi. Hambatan dalam pelaksanaan kaderisasi antara lain konsistensi dan komitmen partai dalam hal pelaksanaan diklat yang berbasis kaderisasi masih rendah, selain itu adanya konflik internal, dan sikap apatisme masyarakat terhadap kinerja dan citra parta Golkar akibat adanya tindakan disintegritas dan perilaku kader yang melanggar hukum

Kata kunci*:* Komunikasi Politik, Kaderisasi, Perempuan, Partai Golkar

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

PENDAHULUAN

Negera Indonesia merupakan negeri tumbuh serta mempraktikkan sistem demokrasi, dimana hak buat diseleksi serta pasti saja buat memilah jadi suatu keunggulan didalamnya. Tetapi apa yang terjalin saat ini politik jadi sesuatu perihal yang susah umtuk didapatkan oleh warga spesialnya untuk kalangan wanita (Bone, n. d.).

Di dalam realitas kehidupan di Indonesia, bermacam riset melaporkan kesamaan gender dalam mendapatkan khasiat yang sama serta adil dari hasil pembangunan antara pria serta wanita(tercantum anak wanita) belum tercapai, perihal ini disebabkan masih kuatnya budaya patriarki yang menempel di tengah warga di Indonesia.

Budaya patriarki ini menempatkan pria selaku sentral terutama yang menempatkan peran pria lebih diatas kalangan wanita didalam kehidupan. Tetapi, gender tidaklah tipe kelamin laki- laki serta wanita selaku pemberian Tuhan. Gender lebih ditekankan pada perbandingan peranan serta guna yang terdapat serta terbuat oleh warga. Dalam kancah perpolitikan Indonesia sampai dikala ini masih sangatlah di dominasi oleh pria.

Gender jadi isu yang banyak di perbincangkan seirama menyusulnya akses yang terbuka buat kalangan wanita terjun di

kancah politik. Perihal ini sebab terdapatnya regulasi yang tertuan pada UU Nomor. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif serta UU Nomor. 2 Tahun 2011 tentang pergantian UU Nomor. 2 Tahun 2008 tentang partai politik(Parpol) sudah mengamanatkan buat membenarkan paling tidak kuota 30% buat keterlibatan wanita dalam parlemen

(Gusmansyah& Bengkulu, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa : menyertakan paling sedikit 30 Persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota (Priandi & Roisah, 2019).Negera Indonesia merupakan negeri tumbuh serta mempraktikkan sistem demokrasi, dimana hak buat diseleksi serta pasti saja buat memilah jadi suatu keunggulan didalamnya. Tetapi apa yang terjalin saat ini politik jadi sesuatu perihal yang susah umtuk didapatkan oleh warga spesialnya untuk kalangan wanita (Bone, n. d.).

Didalam realitas kehidupan di Indonesia, bermacam riset melaporkan kesamaan gender dalam mendapatkan khasiat yang sama serta adil dari hasil pembangunan antara pria serta wanita(tercantum anak wanita) belum tercapai, perihal ini disebabkan masih kuatnya budaya patriarki yang menempel di tengah warga di Indonesia.

Budaya patriarki ini menempatkan pria selaku sentral terutama yang menempatkan peran pria lebih diatas kalangan wanita didalam kehidupan. Tetapi, gender tidaklah tipe kelamin laki- laki serta wanita selaku pemberian Tuhan. Gender lebih ditekankan pada perbandingan peranan serta guna yang terdapat serta terbuat oleh warga. Dalam kancah perpolitikan Indonesia sampai dikala ini masih sangatlah di dominasi oleh pria.

Gender jadi isu yang banyak di perbincangkan seirama menyusulnya akses yang terbuka buat kalangan wanita terjun di

kancah politik. Perihal ini sebab terdapatnya regulasi yang tertuan pada UU Nomor. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif serta UU Nomor. 2 Tahun 2011 tentang pergantian UU Nomor. 2 Tahun 2008 tentang partai politik(Parpol) sudah mengamanatkan buat membenarkan paling tidak kuota 30% buat keterlibatan wanita dalam parlemen

(Gusmansyah& Bengkulu, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa : menyertakan paling sedikit 30 Persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota (Priandi & Roisah, 2019).

Kebijakan tersebut membagikan ruang untuk wanita buat turut andil didalam kepengurusan

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

partai buat bersaing dalam kontestasi politik buat memperoleh mandat rakyat supaya dapat duduk di parlemen. Partai politik selaku ujung tombak dalam proses keterlibatan wanita dalam politik wajib mempunyai upaya- upaya yang dicoba supaya wanita ingin serta bergairah buat ikut serta aktif didalam politik. Partai politik diharapkan dapat tingkatkan keterwakilan wanita(Wijayanti& Iswandi, 2021).

Isu pemberdayaan wanita jadi garis besar landasan pikir tentang keterwakilan wanita dalam politik, pula supaya kebijakan-kebijakan serta Undang- Undang yang disusun mempunyai sudut pandang gender, pasti saja ini hendak jadi harapan yang menjanjikan buat perjuangan yang panjang. Guna komunikasi wajib dimanfaatkan optimal dalam proses rekrutmen kader partai politik buat merekrut orang- orang yang dikira layak serta sanggup buat duduk di parlemen ataupun legislatif. Permasalahan gimana suatu partai merekrut orang- orang yang hendak dijadikan calon legislatif pastinya sedikit banyak pengaruhi opsi konstituen, karena nyatanya konstituen memilah orang- orang yang dianggapnya layak serta pantas buat menduduki jabatan publik tersebut.

Sebanyak yang banyak kita amati kalau salah satu arus utama rekrutmen merupakan kaderisasi serta pilih pemimpin dalam sistem negeri demokrasi lewat partai politik. Dikala ini sebagian perihal berarti yang wajib dicoba oleh partai politik merupakan gimana mulai menata diri supaya proses pilih kader/ pemimpin melahirkan kader bermutu, paling utama dalam melahirkan kader- kader wanita dalam partai politik, dalam proses pengkaderan terdapat 2 perkara yang berarti. Awal, gimana usaha- usaha yang dicoba oleh organisasi buat kenaikan keahlian baik keahlian ataupun pengetahuan. Kedua, merupakan keahlian buat sediakan stok kader ataupun SDM organisasi, serta paling utama di khususkan kalangan muda. Ini ialah pembelajaran politik, dimana sepanjang ini kedudukan tersebut terabaikan. Tetapi yang banyak terjalin saat ini merupakan proses pilih yang serampangan tanpa kaidah- kaidah tertentu yang dilkaukan partai politik, bisa dilihat kalau parpol tidak menseleksi secara ketat siapa- siapa yang hendak dijadikan wakil rakyatnya nanti(Erly Hasim, 2016).

Partai GolonganKarya ataupun yang biasa disingkat Partai Golkar merupakan suatu partai politik yang ialah salah satu partai politik terbanyak yang terdapat di Indonesia. Kita seluruh pasti mengenali sepak terjang partai golkar yang sangat lama berkiprah di panggung politik Indonesia. Dengan seluruh dinamikanya, partai berlambang tumbuhan beringing ini yang berdiri pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno masih bertahan sampai saat ini.

Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang awal kali di dirikan pada tahun 1964. Tetapi, dikala itu statusnya belum selaku partai politik, namun Sekber Golkar ataupun Sekretariat Bersama Kalangan Karya. Barulah pada akhir 1998, golkar mendeklarasikan diri selaku partai politik yang mengusung semangat reformasi yang berintikan keadilan, demokrasi serta transparansi.

Partai Golkar Soppeng sendiri pula diketahui mempunyai massa yang banyak dalam perihal kontestasi politik pula selaku partai pemenang dimana pada pemilu kemudian sukses menempatkan wakilnya di DPRD sebanyak 12 kursi.

Di soppeng sendiri keterwakilan wanita dalam politik masih sedikit paling utama dalam lembaga legislatif, dari jumlah totalitas keterwakilan wanita dalam legislatif cuma terdapat 7 orang wanita dari total 30 anggota DPRD bila di persentasikan cuma dekat 21% pasti ini masih kurang dari ambang batasan(https:// dprd- soppengkab. go. id di akses pada 17 Januari 2022).

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini mengambil pada pertanyaan sebagi berikut.

1. Bagaimanakah strategi komunikasi apolitik pada perempuan partai Golkar Soppeng dalam melakukan kaderisasi?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses kaderisasi perempuan partai Golkar Soppeng.

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi politik dalam proses kaderisasi perempuan di Partai Golkar Soppeng. Penelitian ini dilaksanakn pada Februari hingga Mei 2022. Teknik penggumpulan data:

1. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan-informan yang telah di pilih oleh objek penelitian. Alasan memeilih metode wawancara mendalam ini guna untuk mendap[atkan informasi yang lebih rinci ataupun informasi yang lebih detail mengenai dari objek penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber guna untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan.
2. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan di sekitar atau di daerah objek penelitian guna untuk mendukung hasil dari wawancara mendalam dengan informan. Observasi juga dapat dilakukan dengan melakukan perekaman kemudia data dari hasil rekaman itu di amatai kemudaian diolah menjadi data pendukung dari Wawancara.
3. Dokumentasi sebagai pelengkap dari wawancara dan observasi. Teknik dokumentasi dapat berupa gambar, catatan, laporan ataupun dokumen-dokumen lainnya yang telah diolah yang diperlukan oleh peneliti.

Laboratorium Teknik Sipil Universitas Fajar, Makassar Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah (ex Racing Center) No. 101, Karampuang, Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi komunikasi politik terfokus pada bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung, oleh seorang calon Legislatif atau calon pimpinan daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya (Abdullah 2008).

Dalam konteks kaderisasi politisi perempuan, partai golkar dalam hal ini perlu memaksimalkan pola komunikasi politik dalam kegiatan kaderisasi partai. Salah satu unsur komunikasi politik adalah pesan politik, yang merupakan pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis , baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Yaitu bagaimana agar setiap pesan politik yang disampaikan dapat dimengerti oleh setiap anggota ataupun masyarakat.

Sehubungan dengan kaderisasi perempuan di Partai Golkar, tentunya sangat penting untuk melihat sejauh mana strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai Golkar Kabupaten Soppeng. Untuk mengkaji lebih jauh, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan dari partai Golkar, diantaranya Bapak KR, selaku ketua DPD II Golkar Soppeng mengatakan Kegiatan kampanye partai golkar sebagai bentuk komunikasi politik, itu salah satu strateginya, Pola rekrutmen partai Golkar itu terbuka, siapa saja yang minat untuk bergabung, kami akan terima, selama yang bersangkutan memenuhi syarat secara konstitusional dan syarat internal partai Golkar.

1. Strategi Komunikasi Politik Pada Perempuan Partai Golkar Soppeng Dalam Kaderisasi

Pada hakekatnya partai politik merupakan sarana komunikasi politik, mengingat parpol memiliki fungsi menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya untuk mengantisipasi terjadinya miskomunikasi atau kesimpang-siuran pandangan atau opini di tengah masyarakat. Dalam masyarakat moderen yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di pandang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan "penggabungan kepentingan" (interest aggregation). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan, "perumusan kepentingan" (*interest articulation*).

Strategi komunikasi politik Partai Golkar perlu diperkuat dalam rangka untuk menyediakan kelompok kader pada semua strata organisasi yang memiliki keterampilan operasional sesuai kedudukan dan tantangan, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun global. Selain berfokus pada upaya komunikasi politik guna mencapai simpati dan dukungan dari masyarakat.

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Partai politik juga senantiasa harus fokus pada pelaksanaan komunikasi internal di dalam organisasi secara maksimal, salah satunya melalui proses kaderisasi anggota partai.

Pelaksanaan kegiatan kaderisasi merupakan landasan bagi kader untuk mencalonkan diri sebagai anggota legilatif. Kurangnya intensitas pendidikan politik membawa pengaruh besar terhadap eksistensi partai di tengah masyarakat karena pendidikan politik dilakukan untuk mengembangkan kader agar lebih militan dan loyal terhadap masyarakat. Pengkaderan yang dilakukan diikuti oleh setiap jenjang kader baik itu kader yang masih baru, memiliki prestasi ataupun telah memiliki pengalaman yang panjang di Partai Golkar. Melalui proses kaderisasi, diharapkan partai mampu mempersiapkan kader-kader yang nantinya dapat melanjutkan nilai-nilai perjuangan dan tujuan yang dimiliki partai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi komunikasi politik yang dilakukan partai golkar Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan kaderisasi bagi politisi perempuan di partai Golkar, dijalankan melalui berbagai bentuk, yaitu strategi pendekatan kekeluargaan, kampanye politik, sosialisasi program dan kebijakan politis serta melalui saluran media komunikasi.

Pola komunikasi dalam bentuk kegiatan kampanye politik ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan berbagai program dan pencapaian yang telah di raih oleh partai Golkar, sehingga mampu meningkatkan citra partai di masyarakat. Sosialisasi program kebijakan, salah satunya adalah kebijakan kuota 30% bagi perempuan di partai, merupakan produk komunikasi politik yang sasarannya adalah untuk menyampaikan pesan politik terkait adanya jaminan konstitusi bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di wilayah politik secara proporsional dan professional.

Peran media komunikasi politik sangat penting dalam proses komunikasi politik. Media politik dapat menjadi pusat perhatian penguasa karena dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan letigimasi rakyat. Dalam memutuskan dan melaksanakan suatu kebijakan, sangat penting bagi pemimpin untuk mendapatkan persetujuan dan suara rakyat.

Dalam prakteknya komunikasi politik membutuhkan saluran untuk menyampaikan pesannya, adapun yang menjadi saluran komunikasi politik antara lain : 1. Komunikasi massa, 2. Komunikasi interpersonal, 3. Komunikasi organisasi.

Dalam kampanye politik, saluran yang paling efektif untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi massa dengan menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik dan media sosial. Banyak politisi aktor politik atau mereka yang mempunyai kepentingan menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan politiknya guna mempengaruhi publik.

Hal ini sejalan dengan apa yang digambarkan dalam paradigma Laswell, *siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa.* Paradigma ini menyatakan bahwa unsur-unsur komunikasi tersebut berlaku dalam setiap proses komunikasi dan berlaku juga dalam komunikasi politik. Komunikasi politik senantiasa melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik.

Proses komunikasi politik dalam pelaksanaan kaderisasi bagi politisi perempuan di partai golkar melibatkan aktor aktor politik sebagai pemikir, pembawa gagasan, dan pelaksana kegiatan yang memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Implikasi dari strategi komunikasi politik yang digunakan oleh para kader dalam pemilu bisa berpengaruh pada khalayak dengan cepat. Misalnya seseorang memilih calon karena adanya pengaruh atau dampak dalam strategi komunikasi politik yang telah di gunakan oleh para kader politik. Komunikasi politik dalam bentuk kampanye politik memberikan dampak langsung kepada masyarakat untuk menentukan kepada siapa dan partai apa pilihannya. Jelas bahwa strategi politik yang baik dan terencana akan memberikan implikasi positif dan citra politik yang baik bagi suatu partai.

Miriam Budiarjo (dalam (Muhadam Labolo & Teguh Ilham, 2015:11) mendefinisikan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Pendekatan komunikasi politik di tubuh partai Golkar Kabupaten Soppeng, lebih terfokus pada orang-orang terdekat dan yang dianggap memiliki potensi untuk bisa Bersama-sama mengembangkan partai Golkar.

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pola rekrutmen partai diprioritaskan pada orang terdekat, apakah itu keluarga, kerabat atau orang terdekat lainnya. Hal ini lebih dilandasi oleh adanya kesamaan visi, kesamaan kepentingan. Secara teoritis Miriam Budiarjo (2013:403) menjelaskan bahwa partai itu adalah "suatu kelompok yang terorganisasi yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum.

Pragmatisme politik melalui proses perekrutan partai politik seringkali hanya mengedepankan popularitas dan elektabilitas, terlebih jika kandidat memiliki kekuatan di daerah dengan basis massa yang kuat maka akan mudah dalam perekrutan partai politik. Dengan begitu, kader partai yang jumlahnya tidak sedikit yang dianggap mampu tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, hal ini karena dikalahkan oleh figur populer ataupun calon yang memiliki elektabilitas tinggi untuk meraih kemenangan dalam pilkada.

Fakta tersebut mendukung teori homofili dimana arah komunikasi dengan difokuskan orang yang sama, yaitu derajat orang yang berkomunikasi memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Homofili dapat digambarkan sebagai suasana dan kondisi kepribadian dan kondisi fisik dua orang yang berinteraksi karena memiliki kebersamaan usia, bahasa, pengetahuan, kepentingan, organisasi, partai, agama, suku bangsa, dan pakaian. Sulit sekali terjadi interaksi yang intensif jika dua orang yang berinteraksi bersifat heterofili, yaitu tidak memiliki kesamaan bahasa, pengetahuan dan kepentingan."

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Proses Kaderisasi Perempuan Partai Golkar Soppeng

a. Faktor Pendukung

Faktor yang sangat mendukung kaderisasi perempuan di tubuh partai Golkar salah satunya adalah dukungan regulasi berupa tuntutan pemenuhan kuota 30% untuk perempuan di setiap partai. UU No 12 Tahun 2004 memberikan jaminan konstitusional bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ranah politik, melalui keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif.

Mengenai sistem keterwakilan perempuan dan pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di dalam lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 sampai pada pasal 58 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD

Kemudian UU No.8 Tahun 2012 menggantikan UU No. 10 Tahun 2008 mengenai ketentuan 30% keterwakilan perempuan. Pasal 8 ayat 2e, Pasal 55, Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 215B. Pasal 55 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa: "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan"

Sedang Pasal 215B UU No.8 Tahun 2012. Menyatakan: "Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan".

Kebijakan affirmatif untuk perempuan dilandasi oleh pemahaman tentang politik berspektif gender yang dimaknai bukan hanya sebagai pertarungan gagasan (*politics of ideas*), tetapi juga kehadiran yang memberi makna (*politics of presence*) sekaligus dukungan bagi politisi perempuan.

Selain kebijakan politis kuota 30%, dukungan elit partai dalam mengalokasikan anggaran menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan kaderisasi bagi politisi perempuan. Dukungan anggaran biasanya diperoleh dari kader partai yang mapan secara finansial dan duduk sebagai anggota legislatif serta posisi penting dalam struktur pemerintahan. Kontribusi dari para kader partai tersebut sangat mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan kepartaian, khususnya pelaksanaan kaderisasi dan Pendidikan politik atapun diklat yang menjadi agenda rutin bagi partai Golkar. Dalam melakukan proses kaderisasi, komunikasi organisasi menjadi salah satu metode yang dapat digunakan di dalam penerapannya. Pada tahapan pengkaderan, hal-hal yang diinginkan untuk tercapai ialah mewariskan nilai-nilai yang dimiliki partai kepada anggotanya, kemudian juga sebagai upaya menjamin keberlangsungan eksistensi partai dengan cara menghasilkan kaderkader sesuai

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

terhadap visi dan misi partai.

b. Faktor Pemhambat

Mekanisme kaderisasi dalam suatu partai politik sangat penting, sebab dalam era demokrasi saat ini, partai politik menjadi salah satu pilar utama karena peranannya yang sangat penting. Sehubungan dengan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kaderisasi politisi perempuan partai Golkar, ada beberapa hal yang telah diuraikan oleh informan dari partai Golkar Kabupaten Soppeng, yaitu:

1. Hambatan internal

Hambatan internal berasal dari dalam partai golkar sendiri, khususnya dalam hal teknis pelaksanan diklat, dimana terkesan bahwa pelaksanaan diklat di tubuh partai golkar kabupaten Soppeng frekuensinya masih rendah, artinya pelaksanaan diklat yang berbasis kaderisasi masih rendah. Hal ini kemudian menjadi suatu hambatan yang cukup menggaggu efektifitas pelaksanaan kaderisasi politisi perempuan partai Golkar.

Pada dasarnya diklat dilaksanakan secara berkala minimal setahun sekali. Setiap diklat itu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu tahap saja. Setiap agenda yang diperjuangkan oleh Partai Golkar dilaksanakan secara terus-menerus karena proses kaderisasi dalam Partai Golkar merupakan proses yang berjangka panjang untuk meningkatkan kualitas kader-kader secara menyeluruh.

Proses kaderisasi yang berjangka panjang membutuhkan keseriusan pengurus untuk merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang kaderisasi. Kurang diperhatikannya kegiatan yang berorientasi pada pendidikan kader mengakibatkan sulitnya untuk menemukan kader yang memiliki loyalitas terhadap Partai Golkar. Hal ini akan berdampak pada citra Partai Golkar di masyarakat.

Melihat peranan yang sangat vital bagi kader untuk menjalankan roda organisasi partai, Partai Golkar harus dapat melakukan kegiatan pengkaderan secara terencana, berkesinambungan, terintegrasi, dan mencakup seluruh jenis dan jenjang pengkaderan yang dapat menjangkau semua jenjang organisasi dan mampu mencapai target yang ditetapkan. Proses kaderisasi merupakan hal penting dalam menciptakan kader-kader yang berkualitas dan loyal sehingga dapat memperkuat basis partai di tengah masyarakat serta tetap menjaga keberadaan partai. Meskipun demikian, pelaksanaan diklat Orientasi Fungsionaris ini tidak dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk membentuk kader yang berkualitas.

Konflik internal partai juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kaderisasi termasuk inkonsistensi pengurus partai dalam pelaksanaan kegiatan kaderisasi. Tidak konsistennya pengurus partai, menjadikan proses kaderisasi tidak memenuhi target yang maksimal. Performa partai politik yang tidak konsisten terhadap visi dan misi partai, akan berdampak pada melemahnya peran dan fungsi sebagai lembaga/organisasi negara. Lemahnya performa partai politik ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kualitas pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik, justru yang tumbuh dan berkembang pesat adalah menguatnya politik kekerabatan dan juga pencalegan kader secara instan.

Hambatan krusial dalam proses pengkaderan di tubuh partai umumnya terjadi dikarenakan adanya fenomena pencalegan kader secara instan. Faktanya bahwa masih banyak partai yang merekrut tokoh-tokoh atau artis untuk ikut dalam kontestasi politik. Hal ini tentunya menjadi bukti bahwa proses pengkaderan yang berjalan di tubuh partai tidak maksimal, disebabkan partai masih cenderung melihat potensi figur diluar partai untuk menjaga elektabilitas partai.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan kaderisasi terlihat dari sikap apatisme masyarakat terhadap kinerja dan citra partai. Fungsi-fungsi partai politik sebagai representasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan terhadap pemerintah/penguasa, terbilang masih lemah sehingga menimbulkan polemik ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Tentunya hal itu disebabkan oleh integritas politisi yang tidak terjaga dengan baik, sehingga berakibat fatal bagi citra partai itu sendiri.

Kondisi partai saat ini memang belum layak dikatakan ideal. Faktanya masih banyak yang hal yang perlu dibenahi, salah satunya adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang akibat ulah dari parlemen/partai itu sendiri. Banyak masyarakat kecewa dengan kinerja partai atau kader

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

partai, khususnya masyarakat kelas bawah yang dalam hal ini selalu paling dirugikan.

Tingginya kasus korupsi di Indonesia juga menjadi salah satu faktor utama hilangnya kepercayaan masyarakat akan kinerja partai atau tepatnya politisi. Masyarakat lebih banyak disuguhi oleh figur figur partai yang terkesan menggunakan masyarakat, khususnya masyarakat di level grass root sebagai "alat atau tunggangan" politik hanya sekedar untuk mendulang suara. Bahwa Golkar di Kabupaten Soppeng sebagai partai terbanyak kursi di DPRD, tidak menjadi indikasi bahwa masyarakat senang dengan partai itu, tetapi dilihat siapa pimpinan wilayahnya dan dari partai mana, yang jelas ketika seorang bupati dari partai Golkar, maka sudah pasti semua infrastruktur dibawahnya dikerahkan untuk memenangkan partainya.

Berbagai Hal ini kemudian membuktikan bahwa proses kaderisasi ditubuh partai harus dievaluasi kembali. Pola komunikasi dan rekrutmen partai harus benar-benar mampu menyeleksi figur-figur yang layak untuk dipilih sebagai pengemban amanah rakyat. Pelaksanaan kaderisasi khususnya bagi politisi perempuan merupakan tantangan bagi perempuan itu sendiri agar mampu tampil dan menjaga integritas agar tidak terkena polusi disintegrasi, diorientasi yang ujung-ujungnya merusak citra diri dan citra Lembaga atau partai yang mengusungnya.

Kepercayaan masyarakat akan partai politik di Indonesia memang tidaklah tinggi. Berbagai kasus korupsi menjadi alasan terkuat mengapa masyarakat tidak percaya kepada partai politik. konflik internal menambah cerminan buruk partai politik Indonesia, tidak terkecuali konflik yang terjadi pada tubuh Golkar setelah pemilu legislatif 2014. Lembaga Survei Indonesia mengeluarkan survei pada tanggal 18 Mei 2016 yang memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat terhadap Golkar menurun ke angka 10,8% selisih 10% dengan PDIP yang berada di angka 21,5%. Sebagai perbandingan, hasil Pemilu Legislatif 2014 mencatat bahwa PDIP mendapatkan 18,95 persen suara, dan Golkar di angka 14,75 persen. hal itu jelas menurun jauh jika dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 1999 suara Golkar mencapai 22,44 persen, di Pemilu 2004 suara Golkar mencapai 21,58 persen dan di Pemilu 2009, suara Golkar mencapai 14,45 persen.

Prinsipnya bahwa pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader, sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis (rekrutmen) (Azwar, 2008: 3). Hal tersebut diilustrasikan sebagai berikut: kader merupakan hasil dari pengkaderisasian yang diperoleh karena adanya rekrutmen politik. Kader di dalam suatu partai politik sangat menentukan daya jual partai politik di masyarakat.

Kader yang berkualitas dan berkapabilitas, tentunya dihasilkan dari pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang baik dan benar, demikian pula sebaliknya. Dihasilkannya kader kader yang berkualitas dan berkapabilitas tentu akan menyorot partai politik asal kader tersebut muncul. Intinya, kualitas kader-kader yang ada dalam partai politik, sangat dipengaruhi oleh bagaimana strategi komunikasi politik atau pesan-pesan politik yang mampu diterjemahkan dengan baik oleh actor politisi dalam bentuk pola rekrutmen politisi dan mekanisme kaderisasi partai.

Dalam konteks kaderisasi politisi perempuan, maka tantangan yang harus dihadapi adalah efek dari strategi komunikasi politik itu sendiri, yaitu kader politisi perempuan harus mampu memperkuat posisi tawar sebagai kader partai yang telah memiliki jaminan konstitusional, berupa kebijakan affirmative kuota 30%. Jadi kader politisi perempuan di partai Golkar tidak hanya sekedar keterwakilan fisik, tetapi lebih dari itu, kader politisi perempuan mampu menjalankan fungsi fungsi legislasinya sebagai wakil rakyat dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi politik yang dilakukan partai golkar Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan kaderisasi bagi politisi perempuan di partai Golkar, dijalankan melalui, yaitu Strategi pendekatan kekelurgaan, kampanye politik, sosialisasi program dan kebijakan politis serta melalui saluran media komunikasi.

Pendekatan kekeluargaan, Pendekatan komunikasi politik di tubuh partai Golkar Kabupaten Soppeng, lebih terfokus pada orang-orang terdekat dan yang dianggap memiliki potensi untuk bisa Bersama-sama mengembangkan partai Golkar.

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pola komunikasi dalam bentuk kegiatan kampanye politik ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan berbagai program dan pencapaian yang telah di raih oleh partai Golkar, sehingga mampu meningkatkan citra partai di masyarakat.

Sosialisasi program kebijakan, salah satunya adalah kebijakan kuota 30% bagi perempuan di partai, merupakan produk komunikasi politik yang sasarannya adalah untuk menyampaikan pesan politik terkait adanya jaminan konstitusi bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di wilayah politik secara proporsional dan professional.

Peran media komunikasi politik sangat penting dalam proses komunikasi politik. Media politik dapat menjadi pusat perhatian penguasa karena dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan letigimasi rakyat.

Dalam memutuskan dan melaksanakan suatu kebijakan, sangat penting bagi pemimpin untuk mendapatkan persetujuan dan suara rakyat. Dukungan regulasi berupa tuntutan pemenuhan kuota 30% untuk perempuan di setiap partai. UU No 12 Tahun 2004 memberikan jaminan konstitusional bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ranah politik, melalui keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif. Dukungan elit partai khususnya dalam mengalokasikan anggaran kegiatan kaderisasi partai. Hambatan internal, khususnya dalam hal teknis pelaksanaan diklat, artinya pelaksanaan diklat yang berbasis kaderisasi masih rendah. Konflik internal partai dan inkonsistensi pengurus partai, menjadikan proses kaderisasi tidak memenuhi target yang maksimal. Hambatan eksternal berupa sikap apatisme masyarakat terhadap kinerja dan citra partai.

REFERENSI

1. Arifin, Anwar. (2011). Komunikasi Politik, Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesi, Yogyakarta: Graha Ilmu
2. Cangara, Hafied. (2011). Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi, Jakarta: Rajawali Pers
3. Bone, K. (n.d.). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif. 8, 9–19.
4. Elsi, S. D., & Hartati, H. (2019). Pola Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Golongan Karya Terhadap Perempuan Di Kota Jambi. JISIP-UNJA| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi, 2(2), 70–80.
5. Erly Hasim. (2016). Peran Komunikasi Partai Politik Dalam Proses Rekrutmen Kader Perempuan Pada Partai Politik Aceh. July, 1–23.
6. Gusmansyah, W., & Bengkulu, I. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia.
7. Https://dprd-SoppengKab.go.id. di Akses Pada 17 Januari 2022
8. Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). GENDER AND POLITICS : Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. 12, 409–432.
9. Harahap. (2017).Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional Politik LIPI. http://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/1246
10. Kay, H., & Zebua, S. (2017). Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
11. Lady, I., Prastiwi, R., Rahmadanik, D., Pumpungan, M., & Surabaya, K. (2022). Polemik dalam karir perempuan indonesia. 45, 1–11.
12. Latifah, Siti. 2011. Komunikasi Organisasi Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) dalam Kaderisasi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
13. Muhadam Labolo & Teguh Ilham. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemillihan Umum Di Indonesia.
14. McNair, Brian, 2003. An Introduction to Political Communication, New York-London : Routledge Taylor & Francis Group.
15. Muhammad. (2017). Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemiihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene. The Politics, 2(01), 110–120.
16. Nimmo, Dan. (2004). Komunikasi Politik Konsep,Teori dan Strategi, Jakarta : Rineka Cipta.
17. Politik, P., & Mataram, U. I. N. (2018). Politea : Jurnal Politik Islam Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender Very Wahyudi Pendahuluan Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik yang di dalamnya mencakup seluruh warga Negara baik laki- mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik , karena sejumlah keputusan politik yang dibuat melibatkan perempuan sebagai sasarannya . Reformasi politik di Indonesia sebenarnya memberikan harapan yang besar bagi perempuan yang selama ini hak politiknya masih terpasung . Gerakan-gerakan muncul dengan berbagai usaha. 1(1), 63–83.

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

18. Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 106. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116
19. Purhantara, W, (2010). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, Yogyakarta : Graha Ilmu.
20. Sugiyono. (2010). Metodelogi Penelitian Administrasi, Jakarta : CV Alfabeta.
21. Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). S a s i. 27(28), 475–491. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.563
22. Yesicha, C. (2019). Jurnal Communiverse (CMV) Vol 5 No 1 (2018): Desember e-ISSN 26144956. 5(1), 7–16.

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.